

PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA NAGELE KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU

Oleh

Uci Umar¹, Rama Munjiani Banggu²

^{1,2} Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Email: uciumar321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan penjelasan secara deskriptif sedangkan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui teknik pengamatan, Teknik kuesione dan Studi dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu yang berjumlah 1573. Adapun teknik penarikan sampel menggunakan rumus Slovin dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 319 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sudah menunjukkan baik yaitu dengan persentase mencapai rata –rata kedua variabel tersebut sejumlah 80,5%

Kata Kunci : Pemahaman, Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik.

Abstract

This research was carried out in Nggele Village, North West Taliabu District, Taliabu Island Regency, with the aim of finding out the extent of Village Government Officials' understanding of the principles of good governance in Nggele Village, North West Taliabu District, Taliabu Island Regency. In this research, the author used a quantitative research type with descriptive explanations, while collecting data was carried out through observation techniques, questionnaire technology and documentation studies. Meanwhile, the types of data used are primary data and secondary data. The population in this research is the Nggele Village Community, Taliabu Barat Utara District, Taliabu Island Regency, totaling

1573. The sampling technique used the Slovin formula and the sample in this research was 319 people. The results of this research show that the Village Government Apparatus's understanding of the Principles of Good Governance in Nggele Village, Taliabu Barat Utara District, Taliabu Island Regency has shown good, with the percentage reaching an average of 80.5% for these two variables.

Keywords: Understanding, Principles of Good Governance.

1. PENDAHULUAN

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma dalam administrasi publik. Penyelenggaraan *good governance* lebih menjadi salah satu komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ditingkat desa, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa yang namanya Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai atanggungjawab yang penuh mengenai kemajuan desa tersebut, karena desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam pelaksanaannya aparat pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa,

kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Adanya tuntutan masyarakat Desa untuk menyelenggarakan *good governance* membuat pemerintah Desa Nggele ke arah yang lebih baik. Namun, tuntutan masyarakat Desa Nggele untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut belum diimbangi dengan partisipasi masyarakat pada proses perumusan kebijakan desa. Pada proses perumusan kebijakan desa di Desa Nggele, terdapat partisipasi masyarakat walaupun masih didominasi oleh kalangan elite desa.

Seringkali partisipasi dipahami hanya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan desa berupa swadaya masyarakat dan semangat gotongroyong, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan yang dikatakan mulai dari bawah pada prakteknya hanya sekedar pelaksanaan kegiatan belaka tanpa ada substansi penyerapan aspirasi terutama dari golongan menengah ke bawah (Eko, 2014). Mengacu pada fakta dilapangan, partisipasi masyarakat di Desa Nggele masih pada level pelaksana kegiatan pembangunan, dan belum sepenuhnya menyentuh pada tahap perumusan kebijakan pembangunan desa.

Pentingnya *good governance* itu sebagai respon atas adanya kegagalan pembangunan di desa (Pramusinto dan Latief, 2011). Pembangunan di Desa Nggele sendiri masih mengalami keterlambatan dari waktu perencanaan. Keterlambatan pembangunan di Desa bersumber dari belum maksimalnya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip *good governance* yaitu efisiensi. Pemerintah Desa Nggele belum efisien dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan RKPDDes masih bergantung pada anggaran dari pusat, padahal pemerintah Desa memiliki potensi desa yang apabila diolah dengan baik dapat memperlancar pembangunan desa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, *good governance* penting diterapkan dalam tata kelola pemerintahan karena hadir sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa. Oleh sebab itu, penting bagi peneliti untuk mengetahui lebih mendalam aspek *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa Nagele.

Dalam penelitian ini untuk mengukur penerapan prinsip *good governance* peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jubaedah, et al (2018) bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam k meliputi :

1) Partisipasi praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bai
(*participation*)

Prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat ditunjukkan dengan indikator berupa ketersediaan forum berpartisipasi bagi masyarakat, ketersediaan payung hukum bagi partisipasi masyarakat, intensitas dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Aturan hukum (*Rule of law*)

Prinsip aturan hukum dapat dilihat dari kualitas pelaksanaan penegakkan hukum, kejelasan dasar hukum, ketersediaan dasar hukum, dan upaya penegakkan hukum.

3) Transparansi (*transparency*)

Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari mekanisme kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemerintahan.

4) Daya tanggap (*responsiveness*)

Prinsip daya tanggap dapat ditunjukkan dengan indikator mekanisme dan kemudahan masyarakat untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintah desa.

5) Berkeadilan (*equity*)

Prinsip berkeadilan dalam tata kelola pemerintahan desa dapat memiliki indikator berupa adanya jaminan kepada semua lapisan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama dan adanya perlindungan bagi kelompok rentan.

6) Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari ketercapaian tujuan pemerintah desa dan proses pencapaian tujuan tersebut.

7) Akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa tercermin dari tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

8) Visi statejik (*strategic vision*)

Prinsip visi stratejik dapat dilihat dari indikator berupa kejelasan arah pembangunan, upaya yang jelas untuk mewujudkan misi, dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Oleh karena itu, untuk menerapkan Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya memerlukan unsur pemahaman dari aparaturnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pemahaman disini lebih menekankan kepada kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Dari pengertian tersebut mengandung 2 makna yakni: *Pertama*, Aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. *Kedua*, sikap dan tindakan aparaturnya dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung

jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu. Berkenaan dengan masih lemahnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu yang ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Aparatur pemerintah desa belum memiliki pemahaman untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang di tetapkan. contohnya masih kurangnya aparatur pemerintah desa yang mampu mengoprasikan komputer, sehingga saat ada pekerjaan yang mengharuskan menggunakan komputer, pekerjaan itu hanya dikerjakan orang yang sama terus menerus.
- 2) Aparatur pemerintah desa belum dapat memahami jenis pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. contohnya dalam memberikan pelayanan administrasi aparatur melakukan kekeliruan dalam membuat redaksi, atau misalnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah surat keterangan tidak mampu tapi yang diberikan hanya sebatas surat keterangan yang isinya menjelaskan tentang penghasilan, tanpa ada redaksi yang menjelaskan bahwa masyarakat tersebut tidak mampu.
- 3) Aparatur pemerintah desa belum mampu menerapkan skala prioritas dalam mengerjakan tugasnya. contohnya masih ada pegawai yang mendahulukan pekerjaan yang masih lama jangka waktu penyelesaiannya, dibandingkan mendahulukan melayani masyarakat yang datang ke kantor kepala desa utama untuk meminta pelayanan administrasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu dan waktu penelitian yaitu bulan Juni sampai bulan Agustus 2020.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kualitatif (Basrowi dan Suwandi,2018:8) meliputi:

- a. Teknik Pengamatan (*observasi*). Melakukan pengamatan secara langsung terhadap Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nagele Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.
- b. Tehnik Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2012:139). Angket di gunakan untuk memperoleh data yang menyangkut Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu.
- c. Studi dokumentasi. Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan berbagai data dari informan yang tersedia dari berbagai lembaga yang terkait dengan keperluan penelitian.

2.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan Masyarakat Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu yang berjumlah 1.573 Orang.

2. Sampel

Persentase ketidatelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 120) bahwa “.....jika jumlah subyeknya dapat diambil antara 10%15% atau

20%-25% atau lebih.” Dalam hal ini penulis mengambil ketidakteelitian 15%. ($e = 15\% = 0,15$) dengan jumlah populasi 1.573 orang ($N=1.573$) jadi jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut”.

$$n = \frac{1573}{1 + 1573(5\%)^2}$$

$$= \frac{1573}{1 + 1573(0,0025)}$$

$$n = \frac{1573}{1 + 3,93}$$

$$n = 319,06 \text{ (di Bulatkan 319)}$$

Dari total sampel keseluruhan adalah 319 Orang dapat dirinci sebagai berikut;

Kepala Desa	:	1	Orang
Sekretaris Desa	:	1	Orang
Kaur Desa	:	3	Orang
Ketua BPD	:	1	Orang
Anggota BPD	:	3	Orang
Masyarakat Desa	:	310	Orang
Jumlah	:	319	Orang.

2.4 Metode Analisis Data

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain: Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data bersifat data yang mengadakan pengolahan dan penganalisaan data yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis dengan penjelasan secara sistematis.

Agar lebih efisien, relevan dan akurat, maka analisis data ini didasarkan pada jenis sumber data yang terkumpul. Untuk data hasil kuesioner dilakukan olahan hasil dalam bentuk tabulasi untuk mendapatkan persentase dan mendapatkan gambaran kesimpulan. Menurut Sugiono (2012, 93) Penentuan persentase untuk memudahkan penarikan kesimpulan dengan menggunakan rumus :

- 1) Menghitung frekuensi (f)
- 2) Menghitung Persentase (P) jawaban dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Prosentase
F = Frekuensi jawaban responden
n = Total frekuensi
100% = Bilangan tetap

3. PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Rebulik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah ndonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang RI No.6 tahun 2014).

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : *Pertama*, Profesi aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. *Kedua*, Pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Dari hasil pembahasan hasil kuisioner di atas peneliti akan melakukan rekapitulasi dari variabel X dan Variabel Y untuk diketahui secara jelas Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu.

Adapun rekapitulasi jawaban responden yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel X

Tabel	Jumlah Skor	Kriteria
5.3	93	Sangat Baik
5.4	83	Sangat Baik
5.5	76	Baik
5.6	83	Sangat Baik
5.7	80	Baik
5.8	71	Baik

5.9	83	Sangat Baik
5.10	88	Sangat Baik
5.11	80	Baik
Jumlah	737	
Rata-Rata	737: 9 = 82	Sangat Baik

Sumber : Data primer November Tahun 2020

Dari tabel diatas yaitu Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel X (Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa), dengan mendapatkan nilai rata-rata **82%** atau masuk kategori sangat baik.

Untuk mengetahui Variabel Y (Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik) penulis akan jabarkan dalam bentuk tabel rekapitulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel Y

Tabel	Persentase jawaban (%)	Kategori
5.12	75	Baik
5.13	82	Sangat Baik
5.14	81	Sangat Baik
5.15	81	Sangat Baik
5.16	79	Baik
5.17	55	Cukup Baik
5.18	70	Baik
5.19	76	Baik
5.20	90	Sangat Baik
5.21	82	Sangat Baik
5.22	80	Baik
5.23	83	Sangat Baik
5.24	97	Sangat Baik
Jumlah	1031	
Rata-Rata	1031: 13 = 79	Baik

Sumber : Data Primer November Tahun 2020

Dari tabel diatas tentang Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel Y (Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu) ternyata dari hasil rekapitulasi rata-rata nilai yang diperoleh **79%** atau masuk pada kategori baik.

Sedangkan untuk mengetahui secara umum tentang Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat rata-rata tanggapan untuk kedua variabel diatas seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Variabel

No	Variabel	Persentase (%)	Kriteria
1	X1	82	Sangat Baik
2	Y	79	Baik
Jumlah		$161/2 = 80,5$	Baik

Sumber: Data setelah diolah November Tahun 2020

Jika dilihat dari rekapitulasi kedua variabel penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel X (Pemahaman) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 82% sedangkan Variabel Y (Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 79%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sudah menunjukkan baik yaitu dengan persentase mencapai rata –rata kedua variabel tersebut sejumlah 80,5%.

5. SARAN

Melihat dari kesimpulan diatas secara umum hasil penelitian ini menunjukkan sangat baik, walaupun demikian perlu kami menyarankan kepada:

1. Diharapkan aparatur desa dapat lebih kreatif lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diharapkan aparatur desa lebih merespon dengan cepat aspirasi dari masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Perlu adanya pembinaan/ pelatihan untuk aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur desa

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Arikunto, Suharsimi. 2012. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta : Rhineka Cipta

Basrowi dan Suwandi (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana

Dimiyati dan Mujiono. 2014. *Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: PT Rineka Cipta). Hal:201

Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS).

Handyaningrat, Soerwono. 2012. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung

Jubaedah, E., Dawud, J., Mulyadi, D., et al. (2018). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah/Kota*. Bandung : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).

Kurniawan Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan

Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11, No1, 1-1. Diakses melalui ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/588/581 pada 3Juli 2020

Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudijono, Anas. 2014. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo

Sugiono, 2011. *Metodologi Administrasi*. Bandung:Alfabeta. Hal 118-127

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta

Surianingrat, Bayu. 2012. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Umar, Husein. 2012. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

UNDP. 2017. "The Principles of Good Governance". *Reconceptualising Governance: Discussion Paper No. 2*.

Widjaja. 2015. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara